

ABSTRACT

Implementation of the National Program for Community Empowerment Rural Mandiri (PNPM-MP) and Their Impact on Poverty Reduction in Sub Cape Sijunjung Tower District.

(Case Studies Special Events Women's Savings and Loans)

(Harry Oscar Hidayat, Dr. Asmawi, MS, and Dr. Sri Zul Chairiyah, MA)

PNPM-MP is a community empowerment program in which each of the activities carried out to empower people so that they get out of the shackles of poverty and to achieve the vision of this program is the welfare and independence of the poor. But in actual savings and credit activities for women which is one of the PNPM-MP activities that relate directly to poor households, the less bring maximum results for reducing poverty in the district of Tanjung Tower and not fully able to empower the poor. This study aims to describe the implementation of Mandiri National Community Empowerment Program (PNPM-MP) Special Savings and Loans Women activities in the district of Tanjung Tower and analyze the impact of the implementation of the PNPM-MP-Girls savings and loan activities for poverty reduction in Sub Cape Tower.

This study uses a qualitative approach to the type of descriptive research, descriptive Using this type are expected to be able to grasp an understanding of social phenomena based on the symptoms observed during the study. The study was conducted at the location of research conducted in the subdistrict of Cape Tower, District of West Sumatra province Sijunjung.

From this study the authors also provide some suggestions for future improvement of women's savings and loan activities is the need for policies that are more mature and clearly supported by accurate data, the existence of special or independent agency in charge of the verification team for all government programs that are savings and loans so that fore no longer overlap the loan, which in turn makes people come back poor, the briefing to the candidate receiving the savings and credit activities for women in order to properly manage the loan funds to borrowers can be responsible with their loans, especially in the capital loan repayment, the better control that the work done by the poor can be more, the selection of the manager or director of savings and loans activities better (selectively) as well as the need for ongoing training for managers so that in the administration of activities can be better and the future for women's savings and loan activities can grow even more recommended that these efforts can be enhanced by exploring to be formed into cooperatives or similar owned villages or districts. With the establishment of a cooperative and incorporated, will be a lot of benefits such as additional capital from other parties so as not to rely on assistance from the Government again.

Keywords: Poverty Reduction, Savings and Loan Activity PNPM-MP-Girls

PENDAHULUAN

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea kedua Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.

Berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan sejak lama dengan berbagai program, misalnya : Inpres Desa Tertinggal (IDT), P3DT (Program Pengadaan Prasarana Desa Tertinggal), Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi

(PDM-DKE), dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM). Selain itu, terdapat banyak program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan berbagai kementerian dan lembaga. Misalnya, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP), Proyek Peningkatan Masyarakat Pesisir dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Paling tidak, sejak 2004. ada sekitar 55 program atau proyek yang dilaksanakan sekitar 19 departemen/lembaga pemerintah non departemen (LPND).

Selain itu, pada tahun 2006 Pemerintah telah menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009 dan juga pada pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) melalui antara lain :

meningkatkan anggaran bagi Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, penanggulangan kemiskinan, khususnya didalam “Arah Kebijakan mengkonsolidasikan dan memperluas Pembangunan Daerah”, antara lain program penanggulangan kemiskinan dinyatakan “mengembangkan otonomi berbasis masyarakat, pengembangan daerah secara luas, nyata dan bertanggung usaha mikro, kecil dan menengah, jawab dalam rangka pemberdayaan pengembangan energi alternatif untuk masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga membantu masyarakat miskin, politik, lembaga hukum, lembaga meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keagamaan, lembaga adat dan lembaga bagi masyarakat miskin, meningkatkan swadaya masyarakat, serta seluruh potensi akses masyarakat miskin terhadap masyarakat dalam wadah NKRI “. pelayanan prasarana dasar, pendidikan Sedangkan didalam UU. Nomor 22 Tahun dan kesehatan, serta menyempurnakan 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara sistem bantuan dan jaminan sosial untuk lain ditegaskan bahwa “Hal-hal yang rumah tangga miskin. mendasar dalam undang-undang ini

Program Pemberdayaan Masyarakat adalah mendorong untuk memberdayakan merupakan salah satu kebijakan masyarakat, menumbuh kembangkan pemerintah dalam rangka mengentaskan prakarsa dan kreativitas, serta angka kemiskinan sebagai salah satu meningkatkan peran serta masyarakat “. prioritas tujuan pembangunan. Kebijakan

Pemerintah tentang pemberdayaan Salah satu program pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional masyarakat secara tegas tertuang didalam Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Mandiri yang dibentuk berdasarkan GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim penanggulangan kemiskinan yang berkoordinasi dengan Koordinator Penganggulangan Kemiskinan berkelanjutan.

Nomor; Untuk tahun 2009, PNPM Mandiri
28/KEP/MENKO/KESRA/XI/2006 Perdesaan diselenggarakan di 30 Propinsi
tentang Tim Pengendali Program Nasional yang meliputi 342 Kabupaten dengan
Pemberdayaan Masyarakat yang jumlah kecamatan sebanyak 3.908
kemudian disempurnakan dengan lahirnya Kecamatan. Di antara Kecamatan yang
Keputusan Menteri Koordinator Bidang memperoleh program PNPM Mandiri
Kesejahteraan Rakyat No: Perdesaan ini adalah Kecamatan Tanjung
25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 Gadang Kabupaten Sijunjung Propinsi
tentang Pedoman Umum Program Sumatera Barat sesuai dengan Surat
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Menteri Dalam Negeri
Mandiri (PNPM-Mandiri), dimana Nomor.414.2/291/PMD tanggal 14
program tersebut merupakan salah satu Januari 2009 perihal Penetapan Daftar
program utama pemerintah dalam Lokasi dan Alokasi BLM PNPM-Mandiri
menanggulangi kemiskinan dan perluasan Perdesaan T.A. 2009 yang kemudian
lapangan kerja yang berbasis ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati
pemberdayaan Masyarakat. PNPM- Nomor. 188.45/351/KPTS-BPT-2009
Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi perihal Pelaksanaan PNPM Mandiri
dan pengembangan sistem serta Perdesaan di Kecamatan Tanjung Gadang.
mekanisme dan prosedur program, Pada awal di laksanakannya
penyediaan pendampingan dan pendanaan kegiatan PNPM di beberapa Kecamatan
stimulan untuk mendorong prakarsa dan Kabupaten Sijunjung, dari kedelapan
inovasi masyarakat dalam upaya Kecamatan yang berada di Kabupaten

Sijunjung, Kecamatan Tanjung Gadang merupakan Kecamatan yang paling tinggi tingkat kemiskinannya. Pada Tahun 2003 Kepala Keluarga (KK) miskin di Kecamatan Tanjung Gadang mencapai 35% dari 5.189 total KK.

Di Kecamatan Tanjung Gadang, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat tersebut telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2003 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan / PPK dimana Alokasi Dana sebesar Rp. 749.999.910,- yang terdiri atas Pembangunan Fisik sebesar Rp. 643.223.123,-, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (KSPKP) sebesar Rp. 69.500.000,-, Operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp. 22.276.879,- dan Operasional Unit Pengelola Keuangan sebesar Rp. 14.999.998,-. Kecamatan Tanjung Gadang terdiri dari tujuh Nagari, yaitu Nagari Tanjung Gadang, Nagari Tanjung Lolo, Nagari Langki, Nagari Pulasan, Nagari Sibakur, Nagari Pulasan,

Nagari Timbulun dan Nagari Taratak Baru. Berdasarkan pengamatan awal, terlihat masih terdapat permasalahan tingginya angka kemiskinan yang belum tertanggulangi di Kecamatan Tanjung Gadang

Hasil-hasil kegiatan PNPM di Kecamatan Tanjung Gadang seperti: pembangunan jembatan, saluran irigasi, rigid beton jalan, pembangunan TK atau PAUD, sarana dan prasarana kesehatan, simpan pinjam khusus perempuan (SPKP) dan lain sebagainya belum mampu menyentuh masyarakat miskin untuk lebih berdaya dan memanfaatkan akses yang ada. Sumber daya yang ada di masyarakat seperti sarana dan prasarana, organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya kurang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat miskin karena ketiadaan akses mereka terhadap sumber daya ini. Tiadanya akses terhadap sumber daya ini menyebabkan masyarakat miskin tetap miskin.

PNPM-MP merupakan program Perempuan yang merupakan Kegiatan pemberdayaan masyarakat dimana setiap PNPM yang berdampak langsung pada kegiatan yang dilaksanakan bisa peningkatan ekonomi masyarakat memberdayakan masyarakat sehingga dibandingkan Kegiatan PNPM yang mereka keluar dari belenggu kemiskinan bersifat fisik yang hanya berupa sarana dan visi program ini dapat tercapai yaitu dan prasarana penunjang pertumbuhan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. .

masyarakat miskin. Tetapi dalam Sasaran dari kegiatan simpan pinjam pelaksanaannya program ini belum khusus perempuan ini adalah rumah mampu membawa hasil yang maksimal tangga miskin yang produktif yang untuk mengurangi kemiskinan di memerlukan pendanaan kegiatan usaha Kecamatan Tanjung Gadang dan belum ataupun kebutuhan sosial dasar melalui bisa memberdayakan masyarakat melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang kegiatan-kegiatan yang telah sudah ada dimasyarakat. Pendanaan SPKP dilaksanakan.

Berdasarkan alasan diatas peneliti kegiatan fisik sarana dan prasarana, tertarik untuk meneliti implementasi dimana pendanaan pada SPKP dapat program nasional pemberdayaan dilakukan dengan bantuan langsung masyarakat mandiri perdesaan dan masyarakat dan pelaksanaan dana dampaknya terhadap pengurangan bergulir.

kemiskinan di Kecamatan Tanjung Dalam hal penyaluran dana pada Gadang Kabupaten Sijunjung, dimana prinsipnya sudah baik dalam arti bahwa penelitian ini lebih di fokuskan kepada dana tersebut sampai ke tangan pelaksanaan Simpan Pinjam Khusus masyarakat miskin untuk pendanaan

BLM, Namun sangat disayangkan masih ditemukan adanya pemanfaat simpan pinjam ini bukan dari rumah tangga miskin atau tidak tepat sasaran pada pendanaan perguliran, masih ditemukannya tumpang tindih pinjaman pada program pemerintah lainnya yang menyebabkan adanya kredit macet pada tingkat anggota, kecenderungan verifikasi jenis usaha yang terkesan diatas kertas sehingga masih ditemukannya penggunaan SPKP tersebut untuk kegiatan konsumtif, Kecenderungan pemaksaan kelompok padahal tidak memenuhi syarat sehingga memberikan kesan bahwa yang terpenting program sudah dilaksanakan dan mengabaikan partisipasi masyarakat, akibatnya masyarakat kurang bertanggungjawab terhadap dana bantuan modal yang mereka terima. Sementara itu pada saat yang sama, aparat menganggap bahwa PNPM-MP telah berjalan dengan baik walaupun kenyataan di lapangan belum demikian adanya. Disamping itu,

dalam melaksanakan program ini, masyarakat kurang sungguh-sungguh khususnya dalam hal pengelolaan dana, masih berkembangnya pola pikir zaman orde baru di tengah-tengah masyarakat sehingga anggapan masyarakat kegiatan PNPM-MP merupakan dana hibah yang tidak membutuhkan pertanggung jawaban.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang ada, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan PNPM-MP kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Tanjung Gadang.
2. Bagaimana dampak pelaksanaan PNPM-MP kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan terhadap pengurangan kemiskinan di Kecamatan Tanjung Gadang.

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

- Masyarakat Mandiri (PNPM-MP) kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Tanjung Gadang.
2. Menganalisis dampak pelaksanaan PNPM-MP kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan terhadap pengurangan kemiskinan di Kecamatan Tanjung Gadang.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai analisis pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) dan dampaknya terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kecamatan Tanjung gadang kabupaten Sijunjung ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memberikan makna-makna logis terhadap fenomena sosial secara sistematis dan bertahap, kemudian menguatkannya dengan teori-teori ilmiah, agar pemaknaannya bertahan dan kuat.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif dengan maksud hasil penelitian lebih menggambarkan secara deskriptif, sistimatis, dan faktual terhadap obyek yang diteliti. Dengan menggunakan tipe deskriptif ini diharapkan agar dapat memahami pemahaman terhadap fenomena sosial berdasarkan gejala-gejala yang diamati selama melakukan penelitian.

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian sosial, unit analisis dapat berupa individu, institusi/lembaga dan

masyarakat/kelompok. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan pengertian lain adalah objek yang diteliti, ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaga, yakni Pemerintah Kabupaten Sijunjung, khususnya Kecamatan Tanjung Gadang. Hal ini dimungkinkan karena peneliti bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PNPM-MP dan mengetahui bagaimana dampak PNPM-MP terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kecamatan Tanjung Gadang.

Individu (informan) merupakan representasi dari lembaga Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang mengetahui tentang pelaksanaan PNPM-MP. Oleh karena itu, dalam penelitian ini lembaga dapat dijadikan sebagai unit analisis.

Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan yang dipakai adalah

teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini dipakai karena orang yang diambil sebagai informan adalah orang yang lebih mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Artinya, orang-orang yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dan mengetahui persoalan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Pemilihan informan didasarkan pada kriteria :

1. Pelaku PNPM – MP, baik yang ada di Kecamatan maupun di Nagari
2. Rumah Tangga Miskin yang menjadi Anggota Simpan Pinjam Khusus Perempuan
3. Kelembagaan lokal yaitu pemerintahan nagari

Pengambilan informan dilakukan secara selektif, dimana peneliti menggunakan berbagai pertimbangan berdasarkan konsep/teori yang dipergunakan, keingin tahuan pribadi dan karakteristik pribadi, sehingga diharapkan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh arti.

Informan dalam penelitian ini adalah para pelaku dan pemanfaat dari PNPM-MP di Kecamatan Tanjung Gadang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan PNPM-MP di Kecamatan Tanjung Gadang

Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu, dan sampai dengan

sekarang kegiatan PNPM masih terus dilaksanakan. Pelaksanaan PNPM-MP di Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri yang pada prinsipnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas atau kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Jumlah dana yang digunakan untuk pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Tanjung Gadang selama periode tahun 2007 hingga 2010 mengalami perubahan sesuai dengan volume kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar kegiatan yang dilakukan dalam rangka PNPM-MP

di Kecamatan Tanjung Gadang terdiri atas pinjaman khusus perempuan yang dua kegiatan utama yakni kegiatan merupakan kategori rumah tangga miskin. pembangunan fisik dan kegiatan simpan

Tabel.5.10 Perkembangan Jumlah Dana PNPM-MP di Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2007-2010 (000 Rp)

No	Kegiatan PNPM	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Fisik	562 653.00	2 361 476.50	742 110.00	1 165 790.00
2	Simpan Pinjam Khusus	187 347.00	638 523.50	157 890.00	84 210.00
Jumlah		750 000.00	3 000 000.00	900 000.00	1 250 000.00

Sumber : UPK Kecamatan Tanjung Gadang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan, terdapat beberapa jenis data yang berhubungan dengan Implementasi Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan PNPM-MP di Kecamatan Tanjung Gadang yaitu : data tentang pelaksanaan sosialisasi PNPM-MP, data tentang jumlah penduduk miskin, data tentang Kelompok Simpan Pinjam Perempuan penerima bantuan langsung masyarakat dan data Kelompok

Simpan Pinjam Perempuan penerima dana bergulir.

Berdasarkan data-data tersebut secara garis besar terdapat beberapa tahapan dalam Implementasi Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan PNPM-MP di Kecamatan Tanjung Gadang sebagai berikut :

1. Tahapan Perencanaan
2. Tahapan Pelaksanaan
3. Tahapan Pelestarian

Dampak Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan PNPMP Terhadap Penurunan Kemiskinan yang berarti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Implementasi atau

Kegiatan simpan pinjam khusus perempuan adalah bagian dari PNPMP-kegiatan untuk menimbulkan hasil dimana tujuan akhirnya adalah membantu (*outputs*), keluaran (*outcomes*), dan masyarakat miskin terutama kaum manfaat (*benefit*), serta dampak (*impacts*) perempuan dalam hal permodalan yang dapat dinikmati oleh kelompok sehingga mereka selanjutnya dapat sasaran (*target groups*).

melakukan usaha sesuai dengan bidangnya dimana dari usaha tersebut mereka akan memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini perkembangan jumlah KK miskin di Kabupaten Sijunjung :

Tabel 5.17 Perkembangan Jumlah KK Miskin dan Persentase Perubahan di Kabupaten Sijunjung Menurut Kecamatan, Tahun 2007-2010

No	Kecamatan	Jumlah KK Miskin				Perubahan (%)		
		2007	2008	2009	2010	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kamang Baru	2.416	2.428	2.415	2.393	0,49	-0,51	-0,92
2	Tanjung Gadang	2.201	2.104	2.098	2.018	-4,41	-0,29	-3,81
3	Sijunjung	2.241	2.202	2.200	2.137	-1,73	-0,11	-2,86
4	Lubuk Tarok	877	865	833	819	-1,43	-3,64	-1,68
5	IV Nagari	937	906	897	863	-3,31	-0,94	-3,79
6	Kupitan	741	750	727	711	1,15	-3,03	-2,20
7	Koto VII	1.701	1.677	1.598	1.567	-1,37	-4,72	-1,94
8	Sumpur Kudus	1.808	1.790	1.744	1.698	-1,01	-2,57	-2,64
JUMLAH		12.921	12.721	12.512	12.205	-1,55	-1,64	-2,45

Sumber : BPS Kabupaten Sijunjung Tahun 2007-2011

Secara umum jumlah KK miskin di Kabupaten Sijunjung selama periode 2007-2010 mengalami penurunan. Pada tahun 2008 jumlah KK miskin tercatat sebanyak 12.721 KK atau selama tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 1,55 persen dibandingkan dengan jumlah KK miskin pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2009 jumlah KK miskin kembali menurun menjadi tinggal sebanyak 12.512 KK atau mengalami penurunan sebesar 1,64 persen dibanding dengan jumlah KK miskin pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah KK miskin di Kabupaten Sijunjung tinggal 12.205 KK atau mengalami penurunan sebesar 2,45 persen dibandingkan dengan jumlah KK miskin pada tahun 2009.

Penurunan jumlah KK miskin di Kabupaten Sijunjung secara keseluruhan terjadi di seluruh kecamatan, namun jika dilihat lebih jauh penurunan jumlah KK miskin di Kecamatan Tanjung Gadang relatif lebih baik dibandingkan dengan

penurunan KK miskin di kecamatan lainnya di Kabupaten Sijunjung.

Pelaksanaan PNPB-MP di Kecamatan Tanjung Gadang telah berjalan dari Tahun 2003 dimana pada awalnya bernama program pengembangan kecamatan (PPK), sampai dengan saat sekarang telah menghasilkan berbagai macam sarana dan prasarana fisik serta kelompok-kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang dapat menopang perekonomian masyarakat, sampai dengan tahun 2011 ini saja pemerintah melalui dana pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Sijunjung telah mengucurkan dana sebesar Rp. 9.349.882.119,- dimana untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik sebesar Rp. 7.855.460.316,- dan untuk membantu penambahan modal usaha masyarakat melalui simpan pinjam khusus perempuan sebesar Rp. 1.494.421.803,- serta pengelolaan dana bergulir telah mampu menggulirkan dana

sampai dengan Rp. 9.492.045.300,- (per 31 Januari 2012) untuk 269 kali perguliran dengan 97 kelompok yang tersebar di 31 jorong yang berada di Kecamatan Tanjung Gadang.

Besarnya dana yang telah dikucurkan pemerintah tidak lain tentu untuk mewujudkan visi dari PNPM-MP itu sendiri yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya dari luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Simpan Pinjam Khusus Perempuan yang merupakan salah satu dari kegiatan PNPM-MP telah banyak memberikan dampak yang sangat signifikan untuk penurunan kemiskinan di Kecamatan

Tanjung Gadang, 97 kelompok yang telah menikmati dana simpan pinjam tersebut kalau dirata-ratakan saja 1 kelompok memiliki 13 orang anggota berarti sebanyak 62,49 % rumah tangga dari 2.018 jumlah Rumah Tangga miskin di Kecamatan Tanjung Gadang pada tahun 2010 berdasarkan data sekunder dari dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sijunjung, belum lagi adanya pergantian dan penambahan anggota pada tiap-tiap kelompok karena memang sasaran dari simpan pinjam khusus perempuan ini adalah rumah tangga miskin.

Dalam hal ini peneliti mencoba mewawancarai pemanfaat dari kegiatan simpan pinjam khusus perempuan untuk mengetahui langsung dampak dari kegiatan simpan pinjam khusus perempuan ini untuk mengurangi kemiskinan di Kecamatan Tanjung Gadang, dikarenakan keterbatasan waktu dalam penelitian penulis mengambil sampel berupa pengurus dan anggota

dengan kategori baik dan pengurus dan mengalami perubahan persentase KK anggota dalam kategori buruk dimana hal miskin yang berbeda-beda. ini telah dijelaskan pada teknik pemilihan informan.

Terlihat pada tabel dibawah ini penurunan jumlah KK miskin di Kecamatan Tanjung Gadang menurut nagari menunjukkan angka yang bervariasi dimana masing-masing nagari

Tabel 5.18 Perkembangan Jumlah KK Miskin dan Persentase Perubahan di Kecamatan Tanjung Gadang Menurut Nagari Selama Tahun 2007-2010

No	Nagari	2007		2008		2009		2010		% Perubahan KK Miskin		
		Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Langki	486	287	489	217	499	220	502	211	-24,39	1,38	-4,09
2	Sibakur	387	109	382	113	423	138	396	121	3,67	22,12	-12,32
3	Pulasan	798	394	814	394	838	302	877	294	0,00	-23,35	-2,65
4	Tanjung Gadang	1717	763	1735	743	1748	738	1778	722	-2,62	-0,67	-2,17
5	Tanjung Lolo	943	306	945	304	976	274	1005	261	-0,65	-9,87	-4,74
6	Taratak baru	679	138	689	142	708	189	718	183	2,90	33,10	-3,17
7	Timbulun	808	204	812	191	798	237	823	226	-6,37	24,08	-4,64
	Jumlah	5818	2201	5866	2104	5990	2098	6099	2018	-4,41	-0,29	-3,81
	Persentase	-	37,83	-	35,87	-	35,03	-	33,09			

Sumber : Data diolah dari BPS tahun 2007-2011

Secara keseluruhan, jumlah KK Selanjutnya pada tahun 2009 penurunan miskin di Kecamatan Tanjung Gadang jumlah KK miskin kembali terjadi yang pada tahun 2008 mengalami penurunan tercatat 0,29 persen lebih rendah sebesar 4,41 persen dibandingkan dengan dibandingkan dengan jumlah KK miskin jumlah KK miskin pada tahun 2007. pada tahun 2008. Demikian juga pada

tahun 2010 jumlah KK miskin di dibandingkan dengan jumlah KK miskin Kecamatan Tanjung Gadang mengalami pada tahun 2009. penurunan sebesar 3,81 persen

Tabel 5.19 Perkembangan KK Miskin, Jumlah Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan dan Persentase Penurunan KK Miskin di Kec. Tanjung Gadang Tahun 2007-2010

No	Uraian	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah KK Miskin (KK)	2201	2104	2098	2018
2	Jumlah Dana Simpan Pinjam (Juta Rp)	187,35	638,52	157,89	84,21
3	Penurunan KK Miskin (%)	-	-4,41	-0,29	-3,81

Sumber : BPS, PNPM-MP (Data diolah)

Pada tahun 2007 tatkala PNPM-MP kegiatan simpan pinjam khusus perempuan dimulai dengan dana sebesar Rp.187,35 juta posisi jumlah KK miskin saat itu sebanyak 2.201 KK. Dalam hal ini angka penurunannya tidak dapat dihitung karena data KK miskin tahun 2006 tidak tersedia.

Selanjutnya, ketika memasuki tahun 2008 dana kegiatan simpan pinjam khusus perempuan disalurkan lebih besar lagi dan mencapai Rp.638,52 juta yang didistribusikan ke seluruh nagari di Kecamatan Tanjung Gadang. Seiring dengan penyaluran dana tersebut posisi KK miskin pada tahun 2008 berubah menjadi sebanyak 2.104 KK atau

mengalami penurunan sebesar 4,41 persen dibandingkan dengan jumlah KK miskin pada tahun 2007.

Pada tahun 2009 jumlah dana kegiatan simpan pinjam khusus perempuan hanya dialokasikan sebesar Rp.157,89 juta dan posisi jumlah KK miskin pada tahun 2009 tercatat sebanyak 2.098 KK, atau hanya mengalami penurunan sebesar 0,29 persen dibandingkan dengan jumlah KK miskin pada tahun 2008.

Sedangkan pada tahun 2010 jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan simpan pinjam khusus perempuan dialokasikan sebesar Rp.84,21 juta dan pada tahun 2010 jumlah KK miskin tercatat sebanyak 2.018 KK atau mengalami penurunan sebesar 3,81 persen dibandingkan dengan jumlah KK miskin pada tahun 2009.

Dari perkembangan di atas dapat dilihat bahwa pemberian pinjaman dana

kepada KK miskin oleh pengelola simpan pinjam khusus perempuan di Kecamatan Tanjung Gadang tidak secara langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat miskin pada tahun itu juga melainkan akan berdampak pada tahun berikutnya (tahun $n+1$).

Nagari Tanjung Gadang merupakan nagari yang paling banyak penduduknya demikian juga halnya dengan jumlah KK miskin yang ada di kecamatan tersebut. Sehingga dalam kegiatan usaha simpan pinjam khusus perempuan di Nagari Tanjung Gadang mendapatkan dana yang relatif lebih besar dibandingkan dengan nagari lainnya di Kecamatan Tanjung Gadang.

Namun demikian, jika dilihat dari penurunan jumlah KK miskin di nagari Tanjung Gadang relatif masih rendah dibandingkan dengan penurunan yang dialami oleh nagari lain.

Pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan yang telah berjalan dari tahun 2003 selain telah menjadi bagian penting dari peningkatan ekonomi masyarakat juga telah mampu mengurangi kemiskinan, kegiatan ini juga memberikan dampak lain bagi masyarakat terutama kaum perempuan seperti

1. Menjadi media pembelajaran bagi masyarakat, terutama kaum perempuan dimana dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan selalu diawali dengan bermusyawarah, hal ini akan memunculkan sifat kritis dari kaum perempuan yang nantinya dapat menumbuhkan rasa kepedulian, solidaritas, kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompok
2. Secara tidak langsung melatih kaum perempuan untuk bersikap disiplin dalam pengelolaan keuangan rumah tangga

3. Meningkatnya sumber daya manusia karena banyak pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang melibatkan kaum perempuan dalam pengelolaan administrasi keuangan.
4. Media pembelajaran bagi kaum perempuan dalam berorganisasi
5. adanya perubahan pola pikir kaum perempuan yang dulunya lebih banyak menjadi ibu rumah tangga sekarang menjadi lebih kreatif dalam membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga terjadi perubahan dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat yang berdaya sehingga pemberdayaan masyarakat terlaksana dengan baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan empiris dan pembahasan selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Tanjung Gadang telah dilaksanakan sejak Tahun 2003 dengan dukungan

- kebijakan dan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui pembiayaan bersama (*cost sharing*).
2. Implementasi kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan PNPM-MP di Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung secara umum telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis operasional PNPM-MP, ini terlihat dari dampak dan manfaat yang telah dicapai. Selain itu jika dilihat dari ketaatan terhadap prinsip-prinsip program yang dilaksanakan, secara umum sudah mengikuti prinsip-prinsip yang ada, namun masih ada ditemukan kendala-kendala dalam merealisasikan simpan pinjam khusus perempuan seperti tidak tepat sasaran kepada rumah tangga miskin, dana tidak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan masih ada usaha penyelewengan dana oleh pengurus
 3. Sampai dengan tahun 2011 jumlah dana yang telah dikucurkan untuk kegiatan PNPM-MP di Kecamatan Tanjung Gadang sebesar Rp. 9.349.882.119,- dimana untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik sebesar Rp. 7.855.460.316,- dan untuk membantu penambahan modal usaha masyarakat melalui simpan pinjam khusus perempuan sebesar Rp. 1.494.421.803,- serta pengelolaan dana bergulir telah mampu menggulirkan dana sampai dengan Rp. 9.492.045.300,- (per 31 Januari 2012) untuk 269 kali perguliran dengan 97 kelompok yang tersebar di 31 jorong yang berada di Kecamatan Tanjung Gadang.
 4. Semenjak digulirkannya kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan PNPM-MP telah berdampak bagi masyarakat Tanjung Gadang, kesejahteraan masyarakat mulai meningkat ini terlihat dengan turunnya

jumlah rumah tangga miskin dari tahun ke tahun dimana secara keseluruhan, jumlah KK miskin di Kecamatan Tanjung Gadang pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 4,41 persen dibandingkan dengan jumlah KK miskin pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2009 penurunan jumlah KK miskin kembali terjadi yang tercatat 0,29 persen lebih rendah dibandingkan dengan jumlah KK miskin pada tahun 2008. Demikian juga pada tahun 2010 jumlah KK miskin di Kecamatan Tanjung Gadang mengalami penurunan sebesar 3,81 persen dibandingkan dengan jumlah KK miskin pada tahun 2009.

5. Kegiatan simpan pinjam khusus perempuan telah banyak mengubah pola hidup masyarakat dari tidak berdaya menjadi lebih berdaya ini terlihat dari beberapa kasus dimana dengan adanya simpan pinjam ini telah membuka wawasan kaum perempuan

serta telah mampu mencari celah-celah dalam membantu suami dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya, namun masih ada sebagian pemanfaat yang tidak dapat memanfaatkan SPKP secara maksimal sehingga menimbulkan kesusahan sendiri yang membuat pemanfaat tersebut tidak dapat keluar dari belenggu kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Admiral.1997. *Beberapa penyebab kemiskinan di Indonesia*. Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kemiskinan Organisasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Fisipol UGM.
- Hadiwegono, Soetatwo dan Agus Pakpahan. 1993. *Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia*. Prisma
- Husein Umar. 2003. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Irawan, P. 2000. *Logika Presedur Penelitian*. STIA LAN, Jakarta.
- Indah Gustina. 2008. *Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perkotaan*

- (P2KP) di Kecamatan Medam Maimun. USU diterbitkan.
- J. Lexy Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat : memedukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta : Pustaka Cidessindo
- Khamsiardi, 2009. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah*, Unand tidak diterbitkan
- Maxwell. Jhon. 2007. *25 Ways to win with people*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Nazir, Moh.2003. *Metoda Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant D, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang (Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi)*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta
- Pakpahan, Agus. 1993. *Kemiskinan dan Keterbelakangan Masyarakat Pesisir*. Jurnal Studi Indonesia
- Parsons, Wayne, 2006. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta : Kencana.
- Pranaka, A.M.W dan Prijono, Onny S. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : CSIS.
- Poli W.I.M.1993. *Kemiskinan Gejala dan Akar Suatu Pandangan Tentang Kemiskinan*. Pengantar Diskusi ISEI Cabang Ujung Pandang
- Ruky. S. Ahmad. 2006. *Sistim Manajemen Kemiskinan* , Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Rukminto A, Isbandi. 2008. *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama
- Salim, Emil. 1984. *Kebijaksanaan Pemerataan Mengatasi Kemiskinan*. Jakarta : Dayu Pres
- Sanapiah, Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar dan Aplikasi)*. Malang: IKIP Malang.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- _____, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung Refika Aditama
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Alfabet
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Supriatna, Tjahya, 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Todaro P. Michael. 1989. *Perkembangan Ekonomi di Dunia (cetakan pertama)*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Widodo, Joko, 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi*

Analisis Proses Kebijakan Publik,
Malang, Bayu media

Winarno, Budi.2002. *Teori dan Proses
Kebijakan Publik.* Yogyakarta :
Media Pressindo

Kemeterian Dalam Negeri. *Petunjuk
Teknis Operasional Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan.*
Jakarta

A. Sumber Lain

Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, 2005. *Dokumen Strategi
Nasional Penanggulang
Kemiskinan*

Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung dalam
Angka Tahun 2005,2006 dan 2007

Kabupaten Sijunjung dalam Angka Tahun
2008,2009 dan 2010